

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Percepatan pembangunan bidang ekonomi memerlukan adanya penguatan struktur dan kebijakan yang mampu menopang arus lalu lintas perdagangan secara terintegrasi. Disamping pengembangan infrastruktur, pola distribusi barang dan jasa antar wilayah perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan gejolak harga di pasaran. Ketergantungan supply barang dan jasa dari wilayah lain seringkali menyebabkan terjadinya fluktuasi harga di tingkat pedagang eceran atau konsumen. Guna menciptakan stabilitas harga di tingkat perdagangan eceran secara berkesinambungan, diperlukan ketersediaan informasi yang dianggap relevan.

Salah satu alat yang bisa dijadikan sumber informasi untuk memantau pergerakan harga di tingkat konsumen adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang atau jasa. Kenaikan IHK dapat menyebabkan peningkatan suku bunga, meningkatkan pertumbuhan uang beredar, meningkatkan daya tarik mata uang, dan menaikkan inflasi.

Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah Non IHK sehingga perkembangan harga yang terjadi di tingkat konsumen tidak dijadikan dasar dalam perhitungan inflasi secara Nasional. Dengan demikian, sebagai kabupaten Non IHK, maka analisis dan pelaporan menggunakan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dihitung BPS Pusat dengan sumber data dari SP2KP Kemendag setiap minggu. IPH menunjukkan bahwa terjadi Perubahan Harga yang sangat significant selama 1 Minggu pada komoditas tertentu. Dengan demikian IPH merupakan Proxy inflasi bagi Kabupaten Non-IHK.

Secara Nasional, analisis Indeks Perkembangan Harga dilakukan terhadap 20 (dua puluh) komoditas yaitu : Beras Medium, Daging ayam Ras, Telur Ayam Ras, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung terigu, Daging Sapi, Udang, Ikan Kembung, Mie Instan, Tempe, Tahu Mentah, Pisang, Susu Bubuk Balita, Susu Bubuk dan Jeruk.

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga komoditas pangan pilihan yang sangat berpengaruh terhadap inflasi di Kabupaten Sukabumi selama Triwulan I yaitu Periode Januari s/d Maret 2026.

1. Pada Bulan Januari 2026, Indeks perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Sukabumi sebesar -2,53 % dengan komoditas andil terbesar adalah Cabai Merah (-0,9408), Cabai Rawit (-0,7546), Bawang Merah (-0,4397). Rendahnya harga kelompok cabai disebabkan karena terjadi panen raya di beberapa daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi. Selain itu menurunnya harga cabe disebabkan karena rendahnya permintaan. Potensi kenaikan Komoditas Cabe dimungkinkan akan terjadi mulai Bulan Maret sampai dengan Awal Bulan April 2026 yaitu menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H.
2. Pada Bulan Februari 2026, Indeks perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Sukabumi sebesar 2,06 % meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan Bulan Januari 2026 dimana Komoditas-komoditas yang memberikan andil terbesar adalah Daging Sapi (1,3593), Cabai Rawit (1,0655), Daging Ayam Ras (0,2379). Meningkatnya harga komoditas tersebut karena meningkatnya kebutuhan menjelang ramadhan Tahun 2026.

Pada Bulan Maret 2026, Indeks perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Sukabumi tercatat

sebesar 1,13 % lebih rendah dibandingkan dengan IPH Bulan Februari 2026. Komoditas andil terbesar adalah Cabai Rawit (0,5573), Daging Ayam Ras (0,3126), Cabai Merah (0,2267). Kenaikan harga komoditas tersebut karena meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1447 H.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kabupaten Sukabumi Pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan Kelompok volatile food seperti Cabai Rawit, Cabai Merah, Daging Ayam Ras dan Daging Sapi disebabkan karena terjadinya peningkatan kebutuhan menjelang Ramadhan Tahun 2026 serta rantai pasok yang belum tertata dengan baik sehingga Para pedagang di pasar tidak sepenuhnya memanfaatkan produksi yang dihasilkan oleh lokal Kabupaten Sukabumi.
2. Daya Tampung Hasil Produksi Kelompok volatile food pedagang di Pasar tidak sebanding dengan Jumlah Produksi yang dihasilkan petani, sehingga para petani lebih memilih menjual hasil produksi ke Luar Wilayah Sukabumi melalui para tengkulak.
3. Terjadinya PHK di beberapa Perusahaan Garmen akibat menurunnya omset. Kondisi ini menyebabkan Menurunnya Daya beli Masyarakat.

Kondisi curah hujan yang masih tinggi sampai dengan bulan Februari 2026 menyebabkan kegagalan panen beberapa komoditas yang dibudidayakan di Kabupaten Sukabumi, sehingga perlu dilakukan upaya untuk optimalisasi penanganan masalah produksi, pasokan dan distribusi dalam rangka mendukung stabilitas harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sejalan dengan kebijakan yang ditempuh di tingkat pusat, pengendalian inflasi di Kabupaten Sukabumi pada intinya diarahkan untuk mempertegas komitmen dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif).

1. Keterjangkauan Harga

TPID Kabupaten Sukabumi telah melakukan upaya-upaya selama Triwulan I yaitu :

- Melaksanakan Pemantauan Harga yang dilakukan secara Harian, termasuk Sabtu dan Minggu di 8 (delapan) pasar yaitu Pasar Cisaat, Pasar Cibadak, Pasar Parungkuda, Pasar Cicurug, Pasar Sukaraja, Pasar Palabuhanratu, Pasar Surade dan Pasar Sagaranten. Data Hasil Pemantauan Harga, di Upload kedalam Sistem Aplikasi <https://silinda.jabarprov.go.id>
- Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) selama Ramadhan yaitu :
 - Tanggal 14 Februari 2026 di Desa Sukamaju Kec. Cikakak
 - Tanggal 20 Februari 2026 di Desa Cibodas Kec. Bojonggenteng
 - Tanggal 24 Februari 2026 di Desa Gedepangrango dan Ponpes Yaspida Kecamatan Kadudampit
 - Tanggal 25 Februari 2026 di Desa Cikujang Kec. Gunungguruh

- Tanggal 26 Februari 2026 di Desa Ridogalih Kec. Cikakak
- Tanggal 27 Februari di Desa Cibolangkaler Kec. Cisaat
- Tanggal 03 Maret 2026 di Desa Cidadap Kec. Simpenan
- Tanggal 04 Maret 2026 di Desa Tenjojaya dan Desa Karangtengah Kec. Cibadak
- Tanggal 05 Maret 2026 di Desa Bojongsawah Kec. Kebonpedes
- Tanggal 06 Maret 2026 di Ponpes Assalam Warungkiara
- Tanggal 10 Maret 2026 di Kecamatan Surade
- Tanggal 12 Maret 2026 di Kecamatan Gegerbitung dan Jampangtengah
- Tanggal 16 Maret 2026 di Kecamatan Cidahu.
- Subsidi atau Bantuan Langsung berupa subsidi harga untuk Minyak Goreng, Beras, Terigu, dan Gula Pasir selama GPM

2. Ketersediaan Pasokan

Beberapa Kegiatan TPID Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan dalam rangka menjaga ketersediaan Pasokan selama Triwulan I yaitu :

- Pengelolaan Stok Pangan berupa Cadangan Pangan Pemerin Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan ketersediaan pangan saat terjadi kekurangan atau bencana alam sebanyak 8,25 Ton.
- Monitoring harga/Sidak Pasar yang dilaksanakan pada :
- Tanggal 11 Februari 2025 di Pasar Cisaat dipimpin oeh Kepala Dinas Perdagangan dan Prindustrian
- Tanggal 12 Februari 2025 di Pasar Palabuhanratu dipimpin langsung oeh Bupati Sukabumi

3. Kelancaran Distribusi

Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah :

- Bantuan Pangan yang diberikan kepada daerah terdampak bencana yang terjadi di Kecamatan Bantargadung pada Bulan Maret 2026.
- Pemantauan Distribusi yang dilakukan dari tingkat produsen, distributor, hingga pedagang pasar untuk memastikan bahan pangan tersedia
- Memprioritaskan Angkutan logistik pangan menjelang Idul Fitri 1447 H.

4. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif yang telah dilaksanakan TPID Kabupaten Sukabumi selama Triwulan I Tahun 2026 adalah :

- Mengikuti Rakor TPID seluruh kabupaten/kota se-Indonesia yang dipimpin oleh Kemendagri RI dan dilaksanakan pada hari Senin setiap minggunya.
- Mengikuti Rapat Koordinasi dwimingguan yang dilaksanakan oleh TPID Provinsi Jawa Barat
- Tanggal 04 Februari 2026, Rakor Persiapan Penilaian Kinerja TPID Award
- Tanggal 13 Februari 2026 di Pendopo Sukabumi dilaksanakan Launching SABUMI
- (Sabilulungan untuk harga stabil Kabupaten Sukabumi)

Tanggal 27 Februari 2026 di Pendopo, Rakor Persiapan Pasar Murah Di Palabuhanratu

High Level Meeting yang dilaksanakan dalam Rangkaian Rapat Dinas tanggal 09 Maret 2026 dengan Tema Ketersediaan Bapokting menjelang Idul Fitri.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pengendalian inflasi oleh TPID Kabupaten Sukabumi pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antara stakeholder yang berperan sebagai penentu kebijakan publik perlu lebih ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang terintegrasi dan dapat memberikan solusi kepada persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien.
2. Kegiatan yang dilaksanakan selama ini hanya menasar pada persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek. Belum menjawab persoalan jangka panjang.

Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional karena kenaikan harga setiap tahun berulang terus.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sukabumi untuk diimplementasikan dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Sukabumi Nomor 500/1709/Ekon/2026 tentang Stabilisasi Harga Pangan dan Komoditas Strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Tahun 2026.

1. Keterjangkauan Harga

- Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan Skema Subsidi pada tempat-tempat strategis atau pada saat event tertentu dengan membuat inovasi berupa SABUMI melalui Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 500.2.1/Kep. 211-Ekon/2026 tentang Mobil Sabilulungan Untuk Harga Stabil Kabupaten Sukabumi
- Penguatan Peran BUMD dalam pengendalian inflasi khususnya untuk Program SABUMI.

2. Ketersediaan Pasokan

- Melaksanakan Sidak Pasar atau Pemantauan ke Pasar maupun Gudang Distributor sebagai upaya normalisasi harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan pasokan apabila terjadi gejolak kenaikan harga yang tidak wajar.
- Peningkatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta memastikan bahwa KAD terealisasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasokan pangan.
- Meningkatkan produksi komoditas pangan strategis, khususnya yang secara historis menjadi penyumbang inflasi, antara lain beras, aneka cabai, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi dan lainnya

◦

3. Kelancaran Distribusi

- Menjamin kelancaran distribusi melalui perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang saat ini rusak akibat bencana alam.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok serta meningkatkan peran distributor dan subdistributor.

4. Komunikasi Efektif

- Melaksanakan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi tingkat Kabupaten
- Optimalisasi publikasi SiLINDA di JABAR sebagai sumber informasi harga komoditas pangan strategis di Jawa Barat.

Mempersiapkan dan menyusun program Championship TPID Kabupaten Sukabumi untuk Tahun 2026.